

Penerbitan SPI Bawang Putih Buat Tekan Harga Di Pasaran

Tanggal : Selasa , 06 Oktober 2020

Media : Rakyat Merdeka

Halaman : 9

Wartawan : REN

Muatan Berita : Netral

Narasumber : Rusli Abdullah (*Peneliti Indef*), Agus Pambagyo (*Pengamat Kebijakan Publik*), Didi Sumedi (*Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag*)

Rubrik : Indonesianomics

Topik :

Penerbitan SPI Bawang Putih Buat Tekan Harga Di Pasaran

PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah meminta dilakukan pengusutan terhadap penundaan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih yang ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Menurut Rusli, jangan sampai penundaan penerbitan SPI bawang putih jadi modus untuk mempermainkan harga di pasaran yang berimbas terhadap kebutuhan masyarakat.

"Usut jika memang ada kesengajaan menunda impor bawang putih dengan tujuan menaikkan harga," ujar Rusli saat dihubungi wartawan.

Saat ini, harga bawang putih

di pasaran mulai merangkak naik mencapai Rp 35 ribu per kilogram. Sementara importir mengeluhkan SPI mereka tidak kunjung dikeluarkan oleh Kemendag. Padahal, menurut Rusli, penerbitan SPI bawang putih penting untuk menekan harga di pasaran.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menuturkan, keluhan dari sejumlah importir soal SPI bukan hal baru karena adanya indikasi "ongkos politik".

"Itu berita lama. Kalau belum diberesin importir-importir yang harus bayar biaya-biaya politik, ya akan terus begini sampai kapan pun," tuturnya.

Agus menegaskan, kebiasaan ini sangat mengganggu ekonomi

dan menyalahi aturan. Impor bisa dilakukan saat kebutuhannya kritis, terlebih bawang putih termasuk komoditas yang harus diimpor dan berpotensi banyak barang ilegal. Agus berharap ada kebijakan jelas untuk impor.

Dihubungi terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi menjelaskan, stok bawang putih yang beredar saat ini merupakan bawang putih legal.

Pernyataan ini sekaligus menampik kecurigaan sejumlah pihak yang mempertanyakan masih beredarnya bawang putih di tengah belum diterbitkannya lagi SPI buat importir bawang putih.

"Itu mungkin stok yang

masih ada, sehingga masih bisa memenuhi permintaan dalam negeri dan bisa menjaga harga yang reasonable," ujarnya.

Menurutnya, sekalipun tak mencukupi, sejatinya permintaan dalam negeri juga dipenuhi oleh produksi bawang putih lokal.

"Tergantung sekali tidak, Indonesia masih memiliki produksi bawang putih. Memang kekurangan *supply* atas *demand*, kita impor. Nah, pemerintah harus bisa menjaga juga, jangan sampai jika banjir impor bawang putih harga akan jatuh. Petani tidak ada insentif untuk berproduksi. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Namun, Didi tak mau berko-

kunjang terbit yang dikeluarkan sejumlah importir. Dia juga belum bisa memastikan kapan SPI untuk para importir bisa diterbitkan. "Insya Allah dalam waktu dekat terbit," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino mengeluh. Selama 6 bulan, anggotanya belum mendapatkan SPI namun di pasar banyak terdapat bawang putih impor.

Soal itu, DPR sudah menyarankan agar ada rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi VI dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan. ■ REN